
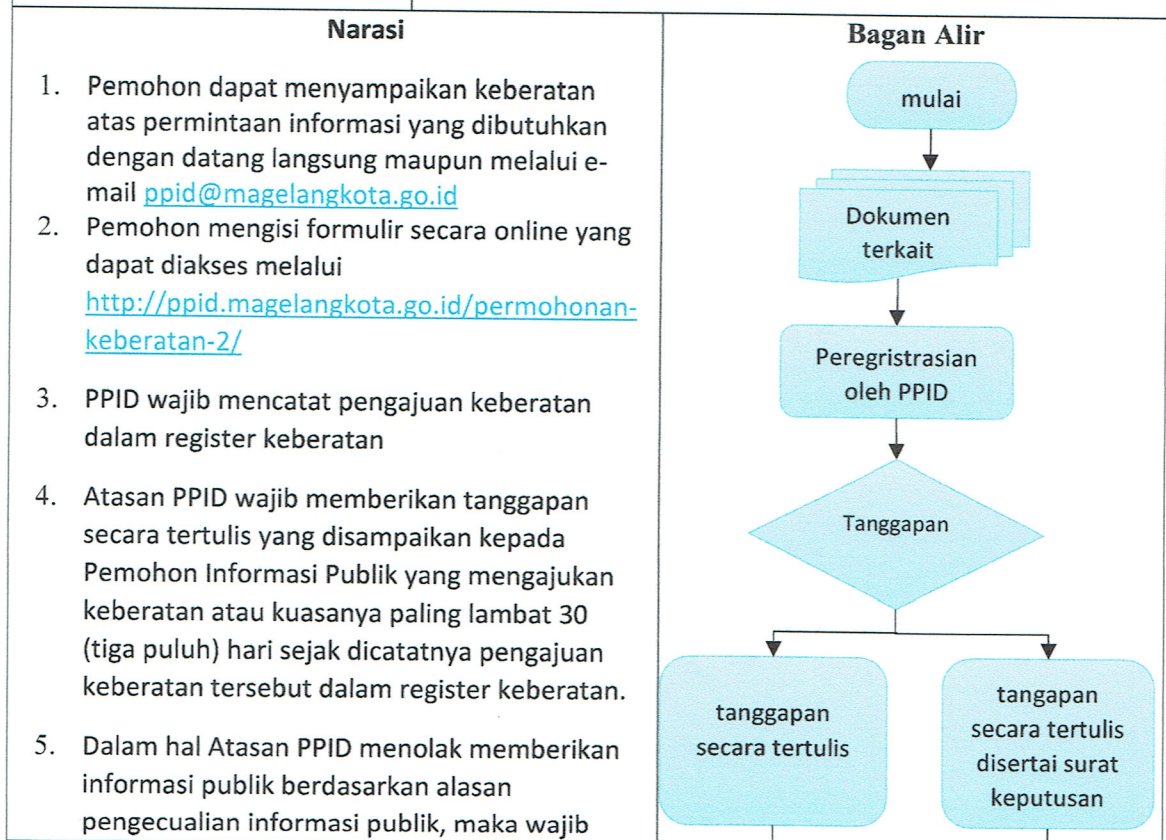

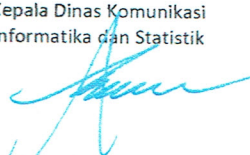
 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang KIP</p>	SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		<p>Ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik</p>  <p><u>Muchamad Abdul Azis, S.H</u> NIP. 19690724 199803 1 006</p>
	SOP	No. Dokumen : 05/437.8/2020	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 3-6-2020	
Halaman : 1			

A. Pengertian	Ketidakpuasan pemohon informasi publik atas putusan PPID terhadap layanan informasi publik yang diminta
B. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Mempermudah dalam hal pengelolaan keberatan atas informasi publik Mewujudkan penanganan keberatan informasi publik yang profesional dan berkualitas sesuai ketentuan perundang-undangan
C. Kebijakan	SK Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
D. Referensi	1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
E. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> Laman resmi (<i>Website</i>) PPID dan/atau Badan Publik. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik. Portal Satu Data Indonesia dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi.
F. Langkah-langkah	



 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang KIP</p>	SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	
	SOP	No. Dokumen : 067/434.8/320
		No. Revisi :
		Tanggal Terbit : 2-6-2022
Halaman : 2	Ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  <u>Muchamad Abdul Azis, S.H</u> NIP. 19690724 199803 1 006	

menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.	
G. Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan Pemohon mengajukan keberatan informasi publik 2. Hasil penyelesaian pengajuan keberatan
H. Unit terkait	Semua OPD dan BUMD Kota Magelang serta RSUD Tidar Magelang
I. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permintaan Informasi Publik 2. Fotocopy KTP atau KK (untuk pemohon perorangan) 3. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP atau KK pemberi kuasa (untuk pemohon kelompok) 4. Fotokopi SK Kemenkumham (untuk pemohon badan hukum)